

PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
“Percepatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional Dalam Rangka
Meningkatkan Keamanan Pasokan Energi Dalam Negeri”
Jakarta, 6 Desember 2005

Hasil Pertemuan dan rekomendasi penting yang disampaikan dalam pertemuan Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Blueprint Pengelolaan Energi Nasional yang merupakan dokumen nasional yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan energi di Indonesia mendapatkan dukungan stakeholder untuk segera diimplementasi. Rencana strategis beberapa departemen terkait telah mempertimbangkan sasaran dan program-program yang ditetapkan dalam Blueprint PEN dan pihak swasta juga mendukung implementasi kebijakan didalamnya, namun masih diperlukan regulasi yang bersifat untuk dapat mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.
2. Kebijakan energi nasional pada umumnya telah menjadi acuan dalam pengelolaan energi daerah, namun implementasinya masih perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat disamping diperlukannya koordinasi dan kerjasama antar Pemda dan Pusat, sehingga dapat difasilitasi tersedianya kebijakan dan program energi yang selaras antar daerah dan antar pemda dengan nasional.
3. Pengembangan energi alternatif menjadi prioritas dalam upaya mengatasi permasalahan energi yang berkaitan dengan kelangkaan energi fosil. Untuk itu beberapa pihak terkait telah merumuskan strategi yang berkaitan dengan pengembangan energi alternatif, namun masih juga diperlukan perumusan kebijakan di beberapa sektor lainnya. Perkembangan di sektor-sektor terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Sistranas (Sistem Strategi Nasional) Departemen Perhubungan yang mengacu kepada Blueprint PEN merumuskan implementasi dengan langkah diversifikasi energi (penggunaan biofuel dan BBG) dan konservasi energi (pengurangan penggunaan kendaraan pribadi).
 - b. Sektor industri mengimplementasikan Blueprint PEN dengan meningkatkan ketersediaan/fabrikasi peralatan hemat energi dan alternatif.
 - c. Bidang energi baru dan terbarukan, yang sarannya ditingkatkan menjadi di atas 10 % memerlukan tindak lanjut berupa kajian secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur/peralatan. Keberhasilan mencapai sasaran tersebut juga ditentukan oleh pengembangan riset. Untuk itu Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam kebijakannya juga telah memasukkan energi baru dan terbarukan ke dalam fokus pengembangan teknologi untuk 5 tahun ke depan.
 - d. Rasionalisasi harga energi perlu dilakukan untuk menyehatkan APBN dan merupakan kunci bagi pengembangan energi alternatif. Diperlukan kebijakan insentif yang memadai dan menarik dunia usaha dalam bisnis energi terbarukan dan masyarakat pemakainya, sistem pembiayaan pengadaan energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan dan kerangka regulasi yang jelas. Bentuk dan besaran

insentifnya perlu diformulasikan secara eksplisit, sehingga instrumen kebijakannya dapat ditetapkan oleh departemen terkait.

- e. Mekanisme CDM (*clean development mechanism*) dapat dipakai untuk mengembangkan energi terbarukan.
- f. Sistem tata niaga dan regulasi pemanfaatan biodiesel perlu segera dibuat khususnya spesifikasi biodiesel dan budidaya tanaman-tanaman penghasil biodiesel agar dapat mengejar sasaran Blueprint PEN 2025 (revisi) sebesar 5%. Untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel perlu didukung oleh regulasi dalam bentuk Pepres, sosialisasi penggunaan biodiesel, serta kebijakan pemberian kemudahan, fasilitas insentif dan subsidi. Langkah yang harus dilakukan untuk mengatur tata niaga biodiesel sehingga lebih aplikatif dalam sektor transportasi antara lain dengan mensahkan B5 dan B10 untuk dijual resmi di SPBU-SPBU, dengan pertimbangan bahwa kandungan FAME (*Fatty Acids Methyl Ester*) yang disyaratkan Ditjen Migas diijinkan sampai 10%, dan bahan baku yang diperlukan tersedia dalam jumlah besar di Indonesia, yaitu nira bergula, bahan berpati dan bahan berselulosa. Namun, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan juga diharapkan dapat mendorong agar lahan-lahan kurang produktif dalam dimanfaatkan rakyat dan para pengusaha untuk budidaya tanaman-tanaman penghasil bahan mentah pembuatan biodiesel dan bioetanol.
- g. Cadangan batubara kadar rendah di Indonesia cukup besar. Untuk memanfaatkannya, kebijakan khusus dalam pemanfaatan batubara cair perlu dipercepat, termasuk pengaturan tata niaganya sehingga dapat dimungkinkan komersialisasi CSO lebih cepat daripada sasaran di Blueprint PEN.
- h. Permasalahan energi daerah yang perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan kebijakan energi nasional adalah bagaimana menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga pemerintah daerah DKI dan Jawa Timur juga mendukung pengembangan energi alternatif.

Dari semua issue-issue yang muncul dalam diskusi pada Pertemuan Tahunan ini, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dan sinergis antara instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta pihak swasta dalam percepatan implementasi Blueprint PEN. Program-program energi dengan pendanaan APBN dan APBD yang selaras dengan Blueprint PEN perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, revitalisasi peran BAKOREN perlu segera dilakukan.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus memberikan insentif (baik fiskal maupun non fiskal) yang jelas dan terjadwal terhadap pengembangan energi alternatif (baru dan terbarukan) dalam rangka menjamin pasokan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Namun demikian, proposal yang jelas mengenai insentif yang diperlukan perlu dibuat dalam menyusun instrumen kebijakan insentif.
3. Daerah diharapkan menyusun kebijakan/*blueprint* pengelolaan energi daerah yang berorientasi jangka panjang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya energi dan arah perkembangan ekonomi daerah sebagai acuan dalam pengelolaan energi daerah. Daerah perlu membentuk BAKOREN Daerah.
4. Perlu segera dibuat regulasi, khususnya tentang spesifikasi dan sistem tata niaga biofuel.